



SIARAN PERS

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2011 Wajar Dengan Pengecualian

Kendari, 5 Juni 2012 – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar kedepannya tidak terulang masalah yang sama. Demikian disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI, Abdul Latief ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 kepada L. M. Rusman Emba selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, 5 Juni 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2011. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Rp5,63 milyar, diantaranya sebesar Rp1,42 milyar merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2004 s.d. 2010 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. Atas permasalahan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum melakukan upaya hukum lebih lanjut, termasuk mengajukan kepada BPK RI untuk proses Tuntutan Perbendaharaan (TP).
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan perkiraan Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp2,09 triliun, diantaranya diketahui terdapat 1.297 item Aset Tetap yang tidak memiliki nilai dan sebesar Rp43,27 milyar Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Instalasi yang tidak didukung dengan informasi spesifikasi kondisi aset yang memadai. Selain itu, jumlah Aset Tetap sebesar Rp2,09 triliun tersebut juga termasuk permasalahan Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp23,06 milyar berupa Aset Tetap eks APBN yang tidak diketahui kejelasan dokumen penyerahannya dan Aset Tetap yang dimanfaatkan/dikuasai oleh non-SKPD tanpa perikatan yang jelas, yang belum dilakukan pemeriksaan dokumen/administrasi dan aspek legalitas dokumen penyerahannya (proses hibahnya) dari Pemerintah Pusat dan/atau status pinjam pakainya.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan perkiraan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain per 31 Desember 2011 sebesar Rp91,74 milyar, diantaranya merupakan Peralatan dan Mesin sebesar Rp79,74 milyar yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaannya tanpa dukungan bukti-bukti yang memadai. Ketiga kondisi tersebut tidak memungkinkan BPK RI untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan memadai.

BPK RI berharap agar pemerintah daerah dan lembaga perwakilan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterangan lebih lanjut:
Sub Bagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Telp: 0401 – 3129403 Fax: 0401 – 3129441
Email : kendari@BPK RI.go.id